

STRATEGI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

Surantijaya Lastri Sukardi
NPP. 32.1031

Asdaf Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: 32.1031@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): East Halmahera Regency is recorded as the area with the highest poverty rate in North Moluccas Province and is higher than the national average in 2024, which is 11.1 percent. **Purpose:** The purpose of this research is to determine and analyze local government strategies in reducing poverty rates in East Halmahera Regency North Moluccas Province. **Method:** The approach used is descriptive with an inductive method. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The technique for determining informants is purposive sampling by considering informants who meet the criteria in understanding policies, systems, and direct involvement with government agencies so as to obtain relevant information. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and data verification. **Result:** The results of the study indicate that the local government's strategy in reducing poverty rates is carried out through collaboration with various sectors. Although there has been progress, significant challenges are still faced, and the results achieved are not yet fully optimal. Supporting factors include budget, regulations and cooperation with related agencies and external parties, while inhibiting factors include the location of remote tribes that are difficult to reach, the accuracy of integrated social welfare data, the condition of road and bridge infrastructure, lack of absorption of labor and skills from the community. Efforts made to overcome inhibiting factors include empowering the KAT (Remote Indigenous Community) tribe, establishing village operators, government programs focused on education, and improving road infrastructure and local governments as facilitators in building cooperation with the private sector. **Conclusion:** The local government of East Halmahera Regency has attempted to reduce poverty rates through various strategies by collaborating and cooperating with various sectors, both between related agencies and external parties. Although there has been progress, significant challenges are still faced, and the results achieved are not yet fully optimal.

Keywords : Poverty Reduction, Strategy, East Halmahera

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Halmahera Timur tercatat sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Maluku Utara dan lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata nasional pada tahun 2024 yaitu 11,1 persen. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. **Metode:** Pendekatan yang dilakukan adalah deskriptif dengan metode induktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan adalah *purposive sampling* dengan mempertimbangkan informan yang memenuhi kriteria dalam memahami

kebijakan, sistem, dan keterlibatan langsung dengan instansi pemerintah sehingga memperoleh informasi yang relevan. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai sektor. Meskipun terdapat kemajuan, tantangan signifikan masih dihadapi, dan hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal. Faktor pendukung mencakup anggaran, regulasi dan kerja sama dengan dinas-dinas terkait maupun pihak luar, sementara faktor penghambat mencakup lokasi suku pedalaman yang sulit dijangkau, akurasi data terpadu kesejahteraan sosial, kondisi infrastruktur jalan dan jembatan, kurangnya serapan tenaga kerja dan keterampilan dari masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat meliputi pemberdayaan suku KAT (Komunitas Adat Terpencil), pembentukan operator desa, program pemerintah berfokus pada pendidikan, dan peningkatan perbaikan infrastruktur jalan dan pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam membangun kerja sama dengan pihak swasta. **Kesimpulan:** Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur telah berupaya dalam menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai strategi dengan melakukan kolaborasi serta kerja sama dengan berbagai sektor baik antara dinas terkait maupun dengan pihak eksternal. Meskipun terdapat kemajuan, tantangan signifikan masih dihadapi, dan hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal.

Kata Kunci : Penurunan Kemiskinan, Strategi, Halmahera Timur

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tiap tahunnya masalah kemiskinan sering kali menjadi topik permasalahan yang selalu dibicarakan. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah karena menanggulangi kemiskinan harus dengan strategi dan kesiapan yang matang. Sementara menurut Bowley (1915) dalam (Moatsos & Lazopoulos, 2021) menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan telah menjadi salah satu indikator dalam pembangunan. Berbagai macam pendorong (kebijakan) penanggulangan kemiskinan telah diidentifikasi dalam literatur, termasuk pertumbuhan ekonomi (Liu et al., 2023). Berbagai kajian juga telah dilakukan untuk melihat fenomena kemiskinan di Indonesia baik pada tingkat regional maupun nasional. Sejalan dengan hal tersebut, indikator mengenai kemiskinan menjadi hal yang dasar untuk melihat kemiskinan secara lebih detail dan mendalam. (Pangestu, 2020)

Kemiskinan menurut (Simangunsong, 2016) merupakan tantangan yang sulit untuk sepenuhnya dihapuskan, upaya berkelanjutan tetap diperlukan agar individu yang hidup dalam kondisi miskin dapat memperoleh hak-hak dasar mereka, seperti akses terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa kemiskinan tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam pemenuhan hak-hak dasar yang menghambat individu untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Menurut (Hakim & Simangunsong, 2021) kemiskinan merupakan isu yang multifaset jika mengacu pada sumber permasalahannya. Ditinjau dari penyebabnya, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup pendidikan rendah dan status pendapatan rendah dari individu, keluarga atau komunitas. Penyebab faktor eksternal mencakup kondisi sosial, politik, hukum dan ekonomi. Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam agenda pembangunan global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengentasan kemiskinan memerlukan kombinasi berbagai pendekatan, termasuk inisiatif berbasis masyarakat. Strategi penanggulangan kemiskinan adalah mengubah posisi

ekonomi masyarakat yang mengalami kemiskinan dengan memberikan mereka akses terhadap keuangan dan menjalankan proyek mikro yang menghasilkan pendapatan. (Nzasabayezu et al., 2024). Sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), tujuan pertama menekankan pentingnya mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia. Hal ini mencerminkan komitmen global untuk memastikan bahwa tidak ada individu yang tertinggal dalam proses pembangunan, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan akses terhadap kebutuhan dasar bagi semua lapisan masyarakat. Maka peran pemerintah disini sangatlah sentral guna menyeimbangkan permasalahan ini sehingga terciptalah program *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dimana terdapat di poin pertama dalam aspek sosial yaitu “tanpa kemiskinan” dengan adanya program ini artinya pemerintah harus dapat menjalankan segala usahanya dengan menerapkan konsep ini serta sejalan dengan visi misi yang sudah ditentukan. (Dzulqarnain et al., 2022).

Menurut Alkire dan Foster (2011) dalam (Moatsos & Lazopoulos, 2021) mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan suatu peristiwa multidimensi. Hal ini sejalan dengan pernyataan menurut Khomsan (2015) bahwa kemiskinan sangat multidimensional, artinya banyak aspek penyebab kemiskinan dikarenakan kebutuhan manusia sangat bervariasi. Menurut Bank Dunia (2020) menyatakan bahwa Indonesia rentan terhadap tingkat kemiskinan relatif tinggi, dengan 30% penduduknya berada dalam kondisi miskin atau rentan terhadap kondisi kemiskinan. Indonesia dalam hal ini masih menghadapi tantangan dalam penerapan SDGs khususnya dalam poin 1 SDGs yaitu “tanpa kemiskinan”. Direktur Riset Indef Berly Martawardaya menuturkan tingkat pengentasan kemiskinan semakin melambat. Selama 2012-2019, pemerintah hanya dapat mengurangi kemiskinan sekitar 0,5% setiap tahun. Ia menilai pemerintah harus fokus pada kemiskinan. Karena akan mempengaruhi tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Ia membandingkan upaya Indonesia dengan negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti India, Vietnam, Sri Lanka, dan Mongolia. Data yang dimaksud adalah untuk tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Berly menekankan bahwa data dapat mencerminkan situasi di lapangan. Dalam hal ini, daerah mana yang maju atau tertinggal sehingga melalui data, banyak hal yang bisa dipercepat. (Dzulqarnain et al., 2022)

Strategi penanggulangan kemiskinan perlu dirancang secara komprehensif dan multidimensi, mencakup peningkatan akses terhadap layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan sosial yang inklusif. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan tepat sasaran dalam mengatasi kemiskinan. Kolaborasi ini harus dilandasi oleh kesamaan visi, sinergi program, serta pembagian peran yang jelas guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai pengarah kebijakan dan penyedia fasilitas pendukung, sektor swasta dapat berkontribusi melalui investasi yang berpihak pada masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja, sementara masyarakat sipil menjadi mitra strategis dalam pengawasan, advokasi, serta pemberdayaan komunitas. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mengurangi angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

1.2. Kesejangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Tingkat kemiskinan di Halmahera Timur pada tahun 2024 ialah sebesar 11,91 persen. Tanpa menilik disparitas antar daerah kecamatan (atau antar desa dalam kecamatan), angka kemiskinan ini lebih tinggi dibanding capaian rata-rata nasional (9.54%) dan lebih tinggi dari

Maluku Utara (6.23%). Juga telah berada pada rentang target penurunan angka kemiskinan nasional yang tertera dalam RPJMN 2020 – 2024 yaitu 6-7 persen, dan masih menjadi tantangan luar biasa jika merujuk pada Target SDGs 2030 yaitu sebesar 00.00 persen. Dari hasil perolehan data yang didapatkan, diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Timur, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Halmahera Timur
Tahun 2019-2024

No	Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2019	15,39
2	2020	15,45
3	2021	15,04
4	2022	13,14
5	2023	12,47
6	2024	11,91

Sumber : BPS 2024, Diolah Peneliti 2024

Berdasarkan data tabel 1.1 tercatat bahwa jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Halmahera Timur periode 2019-2024 terus menurun. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Namun program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah baik oleh pemerintah pusat maupun daerah kendati belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat disparitas antar wilayah kecamatan.

Menurut (Amelia, 2024) mengatakan:

Penyebabnya antara lain ialah: 1) kebijakan yang masih timpang (alokasi anggaran belum proporsional antar wilayah, juga proporsi antar besaran anggaran dan persoalan yang diintervensi) dan 2) metode penanggulangan kemiskinan yang belum terintegrasi antar instansi yang cenderung mengarah pada terjadinya tumpang-tindih program dan sasaran kegiatan antar OPD.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Timur bahwa persebaran penduduk miskin di 10 (sepuluh) kecamatan di Halmahera Timur, masih terdapat 3 (tiga) kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dan di atas rata-rata Maluku Utara sebesar 6,20 persen yaitu Wasile Selatan sebesar 7,845, Wasile Timur sebesar 6,82% dan Maba Utara sebesar 6,53 persen. Adapun 2 (dua) kecamatan dengan tingkat kemiskinan di atas 4,00 persen yakni Maba Selatan dan Kota Maba sebesar 4,07 persen serta Maba Tengah sebesar 4,04 persen. Bila merujuk pada target penurunan angka kemiskinan nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024 yaitu 6-7 persen dan target program *Sustainable Development Goals (SDGs)* tahun 2030 yaitu tanpa kemiskinan dan kelaparan atau setidaknya setengah dai angka

kemiskinan yang maka tantangan yang dihadapi ialah angka kemiskinan masih tinggi di Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2024 yaitu sebesar 11,91 persen, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus di dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh (Suprizal, 2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang telah dilaksanakan dalam pengentasan kemiskinan dengan bantuan Sosial baik berupa uang Tunai maupun Non Tunai yang direalisasikan melalui program Rastra, Program Keluarga Harapan, kemudian Program Indonesia Pintar. Untuk kesehatan pemerintah memberikan bantuan dengan KIS Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pemberdayaan koperasi dan peningkatan keterampilan juga menjadi strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulai.

Penelitian kedua oleh Putra, 2024 hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah aceh dalam mereduksi tingkat kemiskinan menurut konsep *maqashid Syariah* dapat yaitu terdapat tiga upaya/strategi Pemerintah Aceh dalam implementasi profram yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Penelitian ketiga oleh (Ramadhani, 2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Jambi dengan cara memberikan bantuan sosial melalui berbagai program bantuan yang disalurkan seperti bantuan langsung tunai (BLT), programa keluarga harapan (PKH), bantuan pangan sembako, bantuan kesehatan berupa BPJS atau kartu indonesia sehat (KIS), dan pelatihan bimbingan teknis (BIMTEK).

Penelitian keempat (Sanjaya, 2024) hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengentasan kemiskinan ekstrem akan menjadi lebih efektif dan efisien dengan dibentuknya strategi dalam menyusun kebijakan dan sasaran terhadap masyarakat miskin ekstrem yang sesuai dan selaras dengan agenda pembangunan nasional dan daerah. Akan tetapi, dalam proses formulasi strategi dan kebijakan membutuhkan payung hukum dan peraturan daerah yang dituangkan kedalam RPJMD dan RKPD setiap tahun dengan acuan RPJMN dan RKP strategis nasional yang melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rancangan serta selaras dengan visi misi kepala daerah dan nasional.

Penelitian kelima (Fitri, 2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas sosial adalah salah satu lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat sehingga peran dinas sosial dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan dimana meliputi pemberdayaan masyarakat seeptri melakukan sosialisasi, pelatihan serta penyuluhan dan penyaluran bantuan sosial seperti BNPT, PKH dan lainnya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian sebelumnya di atas, terdapat perbedaan yaitu penulis melakukan penelitian yang belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan yaitu strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan dengan menggunakan teori ASOCA menurut Suradinata, 2016 dalam bukunya “Analisis Kepemimpinan

Strategi Pengambilan Keputusan” (2016:18) berdasarkan 5 dimensi, yaitu: kemampuan (*ability*), kekuatan (*strength*), kecerdasan (*agility*), peluang (*opportunities*), dan budaya (*culture*).

Penggunaan konsep teori tersebut berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga menghadirkan kebaruan ilmiah. Peneliti sebelumnya antara lain Suprizal, 2019 analisis teori yang digunakan yaitu pembangunan masyarakat terpadu menurut Waterson dan Perbaikan pangan menurut Djiwandi, selanjutnya penelitian oleh Putra, 2024 dimana pada penelitian ini menggunakan strategi pemerintah Aceh dalam mereduksi tingkat kemiskinan menurut konsep *Maqashid Syariah*, selanjutnya penelitian Ramadhani, 2023 berfokus dalam penuntasan kemiskinan di Kota Jambi, Pemerintah Daerah melakukan beberapa strategi yang telah dilaksanakan dalam penuntasan kemiskinan dan hal ini didapat berdasarkan wawancara dengan pemerintah daerahnya, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya, 2024 menggunakan teori analisis strategi pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahap formulasi strategi menurut John A. Pearce & Richard B. Robinson dalam (Assa, 2009) yaitu Penetapan Visi Misi dan Tujuan, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, dan Analisis dan Pemilihan Strategi, selanjutnya Fitri, 2023 dimana teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori struktural fungsional menurut *Emile Durkheim, Socrates, Plato, Auguste Comte, Spencer, Robert K. Merton* dan *Talcott Parsons*.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara.

II. METODE

Dalam pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif. Penelitian kualitatif memiliki khas tersendiri yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif. Simangunsong, (2017) menjelaskan bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari sebuah makna dengan mengamati bahwa makna yang dibentuk dalam penelitian kualitatif merupakan hasil dari rumusan masalah yang diformulasikan menjadi topik penelitian yang bersifat parsial dan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif menjabarkan suatu kondisi reliabel pada saat penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data, kemudian data yang diperoleh dimaknai melalui analisis dan perumusan terhadap permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan adalah *purposive sampling* dengan mempertimbangkan informan yang memenuhi kriteria dalam memahami kebijakan, sistem, dan keterlibatan langsung dengan instansi pemerintah sehingga memperoleh informasi yang relevan. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Adapun analisisnya menggunakan teori strategi pengambilan keputusan menggunakan konsep teori dari Suradinata, 2016 yang menyatakan bahwa . Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 6 sampai dengan 25 januari tahun 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis yaitu strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan teori analisis ASOCA menurut (Suradinata, 2016). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab sebagai berikut.

3.1. Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur

a. Kemampuan (*Ability*)

Pada dimensi kemampuan (*ability*) terdapat 3 indikator yakni manajemen sumber daya manusia, tersedianya sarana dan prasana dan *capacity building* sebagai bentuk upaya organisasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan didapati informasi bahwa aspek manajemen sumber daya manusia dalam pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menambah jumlah dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama di instansi-instansi teknis yang secara langsung menangani program pengentasan kemiskinan, seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas PUPR.

Indikator yang kedua yaitu tersedianya sarana dan prasarana dimana upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur telah dilakukan melalui berbagai strategi, baik pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah daerah melibatkan berbagai OPD untuk mendukung akses bantuan sosial, pelatihan kerja, dan penguatan UMKM. Meski masih ada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan data, strategi yang diterapkan menunjukkan komitmen dalam mengurangi kemiskinan secara bertahap.

Indikator ketiga yaitu *capacity building* penting untuk meningkatkan kinerja pegawai dan memberdayakan masyarakat. Bagi pegawai, ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Bagi masyarakat, pelatihan dan pendampingan membantu masyarakat lebih mandiri, memahami hak sosial, dan mengakses peluang ekonomi, sehingga mendukung penanggulangan kemiskinan dan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penjelasan setiap indikator di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa dimensi kemampuan (*ability*) dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja kelembagaan dan kualitas pelayanan publik, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan struktural dan teknis yang perlu dibenahi.

b. Kekuatan (*Strength*)

Pada dimensi kekuatan (*sterngh*) terdapat 3 indikator yakni tersedianya dana penunjang kegiatan, komitmen instansi, dan program kerja merupakan suatu keadaan

yang menguntungkan karena dapat menjadi sumber kekuatan yang dimiliki oleh suatu instansi atau organisasi. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan didapati informasi bahwa pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur memberikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk dapat mendukung program-program bantuan pro-rakyat dan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur memanfaatkan dengan baik anggaran yang diberikan.

Indikator yang kedua yaitu untuk menurunkan angka kemiskinan, pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Komitmen instansi ini terbukti dengan adanya bentuk kerjasama lintas sektor, seperti Dinas Sosial dengan Dinas-Dinas terkait untuk menciptakan program yang lebih holistik.

Indikator yang ketiga yaitu program kerja yang terencana dengan baik dapat memastikan bahwa bantuan dan intervensi yang diberikan tepat sasaran, yaitu untuk masyarakat atau wilayah yang benar-benar membutuhkan. Perencanaan yang matang akan memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat kecil tidak hanya didengar, tetapi juga direspons dengan tindakan nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penjelasan setiap indikator di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa dimensi kekuatan (*strength*) dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan adanya fondasi yang cukup kuat untuk mendukung upaya pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Kecerdasan (*Agility*)

Pada dimensi kecerdasan (*agility*) terdapat 1 indikator yakni sistem informasi, penerapan sistem informasi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menjadi lebih fleksibel, adaptif dan efisien dalam menangani masalah kemiskinan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan didapati informasi bahwa strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan dapat dilaksanakan dengan penerapan sistem e-government dalam hal ini aplikasi SIKS-NG memberikan banyak keuntungan dalam penyaluran dana kesejahteraan sosial dan sangat bermanfaat serta sesuai dengan kemajuan teknologi informasi saat ini.

Berdasarkan hasil penjelasan setiap indikator di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa dimensi kecerdasan (*agility*) dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program.

d. Peluang (*Opportunities*)

Pada dimensi kecerdasan (*agility*) terdapat 2 indikator yakni faktor ekonomi dan faktor teknologi. Strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan dengan memanfaatkan peluang sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan didapati informasi bahwa upaya untuk memanfaatkan peluang dengan mengoptimalkan potensi komoditas unggulan di sektor pertanian dan pertambangan di

Kabupaten Halmahera Timur sangat besar dan memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai komoditas utama yang dapat mendukung pembangunan ekonomi daerah di masa depan.

Indikator yang kedua yaitu faktor teknologi memainkan peran yang sangat penting sebagai jembatan penghubung antara masyarakat miskin dengan berbagai sumber daya, informasi, dan peluang ekonomi yang lebih luas, yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau oleh masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat miskin, khususnya petani di Kabupaten Halmahera Timur, dapat memperoleh informasi yang lebih cepat mengenai pasar, harga, teknik pertanian modern, serta metode yang lebih efisien dalam meningkatkan hasil produksi masyarakat.

Berdasarkan hasil penjelasan setiap indikator di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur mencerminkan adanya pemanfaatan peluang ekonomi dan teknologi secara progresif sebagai bagian dari upaya menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

e. Budaya (*Culture*)

Pada dimensi budaya (*culture*) terdapat 1 indikator yakni faktor sosial dimana Penting bagi pemerintah daerah untuk memahami faktor-faktor budaya dan merancang strategi yang sensitif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai lokal agar program dalam menurunkan angka kemiskinan dapat berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan didapati informasi bahwa strategi pemerintah daerah merujuk pada faktor sosial dimana pemerintah daerah tidak hanya memberikan bantuan berupa uang tunai maupun sembako dan bantuan-bantuan lain melainkan pemerintah mendorong kemandirian masyarakat dengan memebrikan peltihan-pelatihan keterampilan agar masyarakat tidak hanya bergantung kepada bantuan.

Berdasarkan hasil penjelasan setiap indikator di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa aspek budaya lokal dan merancang program yang responsif terhadap kondisi sosial setempat, strategi yang dijalankan menjadi lebih efektif dan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan anggaran, tetapi juga oleh sensitivitas terhadap norma sosial, kebiasaan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

3.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur

Faktor pendukung utama dalam strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur mencakup anggaran, regulasi, dan kerja sama dengan dinas-dinas terkait maupun pihak eksternal. Dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005-2025 berperan penting sebagai landasan legalistik dan memberikan analisis yang komprehensif sebagaimana diharapkan dari visi RPJPD “Terwujudnya Kabupaten Halmahera Timur yang Damai, Maju, Adil dan Sejahtera”

secara bertahap telah terjadi penurunan angka kemiskinan. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur membentuk Tim Pengentasan Kemiskinan yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM. Kolaborasi dilakukan dengan berfokus terhadap upaya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian antara lain kondisi infrastruktur yang belum memadai, kurangnya serapan tenaga kerja dan skill dari masyarakat serta masih terdapat suku pedalaman sebagai penyumbang kemiskinan ekstrem di Kabupaten Halmahera Timur. Akses infrastruktur yang kurang memadai di Halmahera Timur masih menjadi tantangan utama. Beberapa wilayah, seperti Maba Utara dan Wasile Utara, masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal karena keterbatasan infrastuktur dan pengembangan wilayah secara umum. Hal ini berdampak pada distribusi ekonomi dan mempersempit kesenjangan antarwilayah. Selain itu, kurangnya serapan tenaga kerja dan skill yang disebabkan faktor pendidikan dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup mandiri. Kemudian, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Halmahera Timur sebagian besar disebabkan oleh ketidaklengkapan data kependudukan Kartu Keluarga yang tidak terdaftar. Hal ini terutama berdampak pada suku KAT (komunitas adat terpencil).

3.3. Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara

Upaya-upaya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur terdiri dari upaya secara langsung maupun tidak langsung. Upaya langsung mengatasi faktor penghambat yaitu melakukan kerja sama lintas sektor dan melibatkan masyarakat, melakukan kerja sama dengan dinas terkait melalui pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan masyarakat, kemudian program-program dari pemerintah yang lebih berfokus pada pendidikan serta peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan. Upaya tidak langsung mengatasi faktor penghambat yaitu pemerintah memfasilitasi masyarakat melalui bantuan-bantuan yang dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam membangun kerja sama dengan pihak swasta salah satunya dalam penyaluran bantuan baik berupa bantuan pendidikan maupun kesehatan serta program bantuan yang dilakukan melalui pemberdayaan terhadap suku KAT (komunitas adat terpencil).

Tabel 1. 2
Matriks Analisis ASOCA

<p align="center">FAKTOR INTERNAL</p>	<p align="center">ABILITY (KEMAMPUAN)</p>	<p align="center">STENGTHS (KEKUATAN)</p>	<p align="center">AGILITY (KECERDASAN)</p>
<p align="center">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p align="center">Strategi ABo</p>	<p align="center">Strategi SO</p>	<p align="center">Strategi AgO</p>
<p align="center">OPPORTUNITIES (PELUANG)</p>	<p>a. Memanfaatkan sumber daya aparatur sebagai kesempatan untuk mengembangkan sumber daya alam melalui penerapan teknologi</p> <p>b. Memanfaatkan program pelatihan keterampilan digital untuk pekerja sektor informal atau usaha mikro kecil (UMKM) yang berbasis teknologi</p> <p>c. Memanfaatkan study banding untuk mempelajari lebih dalam mengenai peluang pemanfaatan sumber daya alam di daerah yang berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan dengan memanfaatkan sumber daya unggulan yang dimiliki</p> <p>d. Mengadakkann seminar dan sosialisasi dalam pemanfaatan teknologi suatu instansi/organisasi terkait.</p> <p>e. Mengembangkan potensi SDA Halmahera Timur secara optimal melalui peningkatan kapasitas masyarakat, sehingga tercipta usaha berbasis lokal yang berkelanjutan dan berdaya saing.</p>	<p>a. Memanfaatkan dukungan program dari kepala daerah mencakup anggaran dalam hal verifikasi dan validasi DTKS</p> <p>b. Memanfaatkan program peningkatan keterampilan kerja dengan difokuskan terhadap kesesuaian sumber daya alam lokal</p> <p>c. Mengembangkan konsep agribisnis dan agroindustri berdasarkan potensi komoditas andalan lokal misalnya kelapa, pala dan padi sawah</p> <p>d. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.</p>	<p>a. Memanfaatkan inovasi sistem informasi melalui aplikasi guna peningkatan pelayanan</p> <p>b. Memanfaatkan sistem aplikasi dengan membentuk operator desa di 10 Kecamatan</p> <p>c. Memaksimalkan kecerdasan Tenaga ahli Administrasi Data Base dari pusat untuk melatih para operator yang ditugaskan di kelurahan dan kecamatan</p> <p>d. Merancang program pemberdayaan dan pelatihan sesuai sektor potensial di setiap daerah.</p>

	Strategi AbC	Strategi SC	Strategi Agc
CULTURE (BUDAYA) a. Peningkatan kapasitas sumber daya melalui pelatihan dan vokasi b. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar c. Menimalkan wilayah kantong kemiskinan d. Interaksi dan berhubungan langsung dengan masyarakat.	a. Mendayagunakan kompetensi yang dimiliki aparaturnya untuk memberikan sosialisasi terkait upaya menurunkan angka kemiskinan b. Memanfaatkan kompetensi aparaturnya untuk memberikan inovasi program dalam menurunkan angka kemiskinan sehingga masyarakat mendapatkan pengetahuan baru.	a. Memaksimalkan strategi pemerintahan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan ke dalam dokumen perencanaan daerah secara terintegrasi antar OPD dan fokus terhadap desa-desa kantong kemiskinan b. Pemerintah perlu melibatkan stakeholder seperti swasta dan komponen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mendukung upaya menurunkan angka kemiskinan c. Memanfaatkan anggaran dalam mengatasi persoalan pendidikan dan peningkatan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan	a. Memaksimalkan kecerdasan yang dimiliki sdm, dan tenaga ahli di bidang teknologi b. Mendayagunakan inovasi dari aparaturnya untuk melakukan pendekatan tanpa bertentangan dengan budaya masyarakat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkap strategi pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam menurunkan angka kemiskinan dengan menggunakan pendekatan teori ASOCA yang meliputi dimensi *ability*, *strength*, *agility*, *opportunity*, dan *culture*. Strategi ini menunjukkan upaya yang bersifat kolaboratif lintas sektor dan terintegrasi, meskipun hasilnya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis.

Secara umum, hasil temuan penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu, meskipun terdapat perbedaan teori yang digunakan dan konteks lokasi. Temuan ini mendukung hasil penelitian Fitri (2023) dan Ramadhani (2023) yang menyoroti peran dinas sosial serta kolaborasi antar OPD dalam pengentasan kemiskinan. Dalam konteks Halmahera Timur, kolaborasi tidak hanya terjadi antarinstansi pemerintah, tetapi juga dengan pihak swasta dan masyarakat, menunjukkan perluasan aktor pelaksana strategi. Penelitian ini menunjukkan peran penting sistem informasi seperti SIKS-NG dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial, memperkuat temuan Sanjaya (2024) yang menekankan pentingnya integrasi perencanaan berbasis data. Namun, penelitian ini lebih menyoroti aspek teknologi sebagai bentuk kecerdasan organisasi (*agility*), yang belum banyak dijelaskan pada penelitian sebelumnya. Tidak seperti penelitian Putra (2024) yang menggunakan pendekatan Maqashid Syariah atau Sanjaya (2024) dengan kerangka strategi pembangunan nasional, penelitian ini menekankan penguatan kelembagaan daerah melalui teori ASOCA. Ini menciptakan kebaruan dalam melihat kemiskinan dari sudut pandang kekuatan internal dan kecocokan budaya lokal. Temuan bahwa pendekatan berbasis budaya dan pelatihan keterampilan lebih diterima oleh masyarakat memperkuat temuan Suprizal (2019) mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat. Namun, penelitian ini menambahkan lapisan baru dengan

menekankan bahwa strategi yang sesuai nilai-nilai lokal memiliki peluang lebih besar untuk berhasil secara berkelanjutan.

Temuan utama penelitian ini memperluas cakupan diskursus mengenai strategi pengentasan kemiskinan dengan mengintegrasikan aspek internal organisasi, teknologi, potensi daerah, dan nilai budaya. Meskipun memiliki kemiripan pada beberapa aspek dengan penelitian sebelumnya, penggunaan pendekatan teori ASOCA memberikan kerangka konseptual yang lebih sistemik dan komprehensif terhadap dinamika kemiskinan di daerah tertinggal seperti Halmahera Timur.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur telah berupaya dalam menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai strategi dengan melakukan kolaborasi serta kerja sama dengan berbagai sektor baik antara dinas terkait maupun dengan pihak eksternal. Meskipun terdapat kemajuan, tantangan signifikan masih dihadapi, dan hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan angka kemiskinan di Halmahera Timur dari 15,45% pada tahun 2020 menjadi 12,47% pada tahun 2023. Namun, kabupaten ini masih tercatat sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Maluku Utara.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan di Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Strategi Pemerintahan Daerah dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Desa Bicoli Kecamatan Wasile Selatan dan Masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, A. (2024). Analisis Indeks Zakat Terhadap Kemiskinan Melalui Distribusi Keadilan (Studi Di Provinsi Bengkulu). *Disertasi: Program Studi Pengkajian Islam, Konsentrasi Manajemen Perbankan Dan Keuangan Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76760/1/AMIE%20AMELIA_SPs.pdf
- Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *PROFESSIONAL: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 9(1), 109–116.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/2505>
- Fitri, M. (2023). *Peran Dinas Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Selatan*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30558/1/MITA%20SKRIPSI%20%281%29.pdf>
- Hakim, A. R., & Simangunsong, F. (2021). Koordinasi Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(2), 85–92.
<https://doi.org/10.47134/villages.v2i2.20>
- Liu, Q., Gao, L., Guo, Z., Dong, Y., Moallemi, E. A., Eker, S., Yang, J., Obersteiner, M., & Bryan, B. A. (2023). Robust strategies to end global poverty and reduce environmental pressures. *One Earth*, 6(4), 392–408. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2023.03.007>
- Moatsos, M., & Lazopoulos, A. (2021). Global poverty: A first estimation of its uncertainty. *World Development Perspectives*, 22(September 2020). <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100315>
- Nzasabayezu, O., Jaya Prakash, S. K., & Rama, R. P. (2024). A study of poverty alleviation strategies for sustainable development: A scientometric analysis. *Heliyon*, 10(13), e33469. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e33469>
- Pangestu, I. M. (2020). Fenomena Pekerja Miskin dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persentase Pekerja Miskin di Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 62–74. <https://doi.org/10.29244/jekp.v8i1.26691>

- Putra, Z. A. (2024). *Analisis Strategis Pemerintah Aceh Dalam Mereduksi Tingkat Kemiskinan Menurut Konsep Maqashid Syariah (Suatu Penelitian pada BAPPEDA Aceh)*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/39482/>
- Ramadhani, P. R. (2023). *Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Jambi*. Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifudin. <https://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/768/>
- Sanjaya, T. (2024). Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung. Universitas Lampung. <https://digilib.unila.ac.id/79051/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Simangunsong, F. (2016). Pencapaian Perkembangan Millenium Development Goals (MDGs) di Kabupaten Asmat. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–23. <http://eprints.ipdn.ac.id/2518/>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan (Cetakan II)*. Alfabeta, cv.
- Suprizal. (2019). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemsikinan di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasar Limau kapas*. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. <http://repository.uinsu.ac.id/8606/>
- Suradinata, E. (2016). *Analisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan Metode Analisis ASOCA (Kedua)*.

